

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akuba, Rusthamrin Haris. *Presiden Buatan Manusia: Memenangkan Pemilihan Presiden. Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Pemasaran Politik*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 4.
- Biro Hukum dan Humas. *KUHP pasal 285 dan 289*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, t.th.
- Budiman, Arief. *Putusan Mahkamah Agung*. Jakarta: KPU-RI, 2018.
- Mahi, M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 27.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Kencana: 2016), 178.
- Neherta, Meri. *Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Sumatra Barat: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, 2017.
- Purwanti, Sumy Hastry. *Kekerasan Seksual pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Reksodiputro, B. Mardjono. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Rofiq, Ainur. Wahyuni, Budi. Limbeng, Julianus. Hodijah, Siti Nurwati. Biantoro, Sugih. *Kertas Konsep: Pencegahan dan Penghapusan Pemoangan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), 20.

Siti Malikhatun badriyah, *Sistem penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik, Cet 1*, (Sinar Grafika: Jakarta), 30.

Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), 59.

Widowatie, Derta Sri. *Lembaga Legislatif: Konstitusi Politik Modern*. (t.kt: Nusamedia, 2021).

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

## B. Jurnal

Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3: 2 (Desember 2017): 43.

Faisal, Muhammad. Matompo, Osgar S. Muliadi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018". *Jurnal Kolaboratif Sains* 2: 1 (Oktober 2019): 1713.

Handayani, Meni. "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Anak", *Jurnal Ilmiah Visi PGTK PAUD dan DIKMAS* 12: 1 (Juni 2017): 73, 73-74, 74, 76.

Maghfirah, Adinda Cahya. Kurniati. Rahman, Abdul. "Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2: 6 (Februari 2023): 2584, 2585, 2586.

Musyafiatun, "Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Siyasah, Al-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, No. 2 Vol 4, (2014).

Muzayanah. "Kajian Putusan Mahkamah Agung Tentang Mantan Narapidana yang Mengajukan Hak Menguji Materiil". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6: 2 (Agustus 2020): 359.

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Child Sexual Abuse: Impact and Handling". *Sosio Informa* 01: 1 (Januari-April 2015): 15, 16.

- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak". *al-‘Adalah* 14: 2 (2017): 406.
- Nurlindah, "Menakar Tujuan Hukum Di balik Keberpihakan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor, *Jurnal Al-Adalah*, No. 2 Vol 4, (2019).
- Nurlindah, "Menakar Tujuan Hukum Di balik Keberpihakan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor, *Jurnal Al-Adalah*, No. 2 Vol 4, (2019).
- P, Utami Zahirah Noviani. K, Rifdah Arifah. Cecep. Humaedi, Sahadi. "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian & PPM* 5: 1 (April 2018): 53.
- Prayoga, A. A. Ngr. Rai Rama. Griadhi, Ni Made Ari Yuliantini. "Pengaturan Mantan Terpidana Korupsi dalam Pencalonan Anggota Legislatif dari Aspek Hak Asasi Manusia", *e-Journal Universitas Udayana* 6: 8 (Juli 2021): 9.
- Purwaningrum, Juli. E, Soekry. "Analisa Pidana Sodomi Pada Anak". *Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia: Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan* (2017): 154-155.
- Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional* 1: 2 (2015): 288-289, 289, 289-230.
- Santoso, Heri. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual". *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* (2020): 5, 6, 8, 9
- Santoso, Heri. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual". *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* (2020): 5, 6, 8, 9.
- Saputro, Langgeng. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara: Studi kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari". *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 6: 4 (2018): 23, 24, 25.
- Saputro, Langgeng. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara: Studi kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari". *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 6: 4 (2018): 23, 24, 25.

Suwandi, Joko. Chusniatun. Kuswardani. "Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan di Wonogiri dan Boyolali". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 29: 1 (Juni 2019): 69, 70.

Triwijati, N.K. Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", (Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center): 1.

Utami, Penny Naluria. Primawardani, Yuliana. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia", Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan: SEMNASKUM t.v: t.n (2022): 4.

### C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Akmal, Faris. "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam". (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 9.

Dewi Agustin Dwiyantri, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peraturan Daerah di Kota Surabaya", (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 18.

Dheanasti, Nadia Priski. "Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah". (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), 5.

Fitria, Neli. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembuktian dengan Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan". (*Skripsi*, UIN Walisongo, 2014), 16.

Gunawan, Andri. "Asuhan Keperawatan Sexual Abuse", (Tugas Individu, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan), 8, 9.

Hapsari, Annisa Tri. "Pelacuran Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 49.

Mashudin, Imam. "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Persepktif Hukum Pidana Islam". (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 70-71.

Pebrianti, Siti. "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 131.



- Praviyanti, Ratri Ariestyia. "Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapat Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan: Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang". (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 15-16.
- Putra, Yoga Permana. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasah". (*Skripsi*, UIN SATU Tulungagung, 2022), 5-6.
- Rahma, Nuryani. "Studi Analisis Hukum Positif dan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018 Tentang Judicial Review Peraturan KPU NO. 20 Tahun 2018", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 86, 87, 88, 89, 90, 91.
- Ridha, Ahmad. "Oral Seks dalam Hukum Islam Studi Komparasi Pemikiran Shahid Athar dan Muhammad Thalib". (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007), 70.
- Rinaldi, Fahrul. "Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah: Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018", (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 44.
- Ryki Setiawan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara)", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), 36-39.

#### D. Website

- Bawaslu Kabupaten Banjar, "Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi", <https://banjarkab.bawaslu.go.id/implikasi-hukum-atas-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-46-p-hum-2018-terhadap-bakal-calon-aanggita-legislatif-mantan-narapidana-korupsi/> (Diakses pada 18 Juni 2023).
- [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod\\_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1) (Diakses pada 15 Juni 2023).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Narapidana", <https://kbbi.web.id> (diakses pada 15 Juli 2023).

LMS Spada Kemendikbud, “Data dan Sumber Data Kualitatif”,

Naim, Jannatun. “Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dilarang Daftar Caleg”, <https://gorontalo.antaranews.com/berita/52571/pelaku-kejahatan-seksual-anak-dilarang-daftar-caleg> (Diakses pada 18 Juni 2023).

### **E. Undang-undang**

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, An-Nisa Ayat 58, 110.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/P/HUM/2018. Jakarta: Mahkamah Agung, 2018.

Presiden Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2014.

Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jakarta Pusat: DPR RI, 2014.

Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Pemerintah Pusat, 1995.

Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018, 74.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018, 69, 70.

